

KEMISKINAN DI KOTA PEKALONGAN (STUDI ETNOGRAFI DI EMPAT KAMPUNG)

Manarul Hidayat¹, M. Erika Rachman², M. Haidar Fikri Kurniali³, M. Rayhan I'tisham⁴,

Rangga Setya Nugraha⁵, Amalia Ida Gunawati⁶, Mutiara Kartika Dewi⁷

^{1,2,3,4,5} Lingkar Kajian Kota Pekalongan

^{6,7} Bappeda Kota Pekalongan

Email: penulis2@cde.ac.id¹, penulis2@cde.ac.id², amaliaida13@gmail.com⁶,
mutiarakartikadewi@gmail.com⁷

Diterima : 6 Desember 2023

Disetujui : 5 Juni 2024

Abstract

Poverty in the City of Pekalongan should be viewed as urban poverty, whose vulnerability is a social construct. This study was conducted on four priority communities to explain poverty in this city, namely: the fishing community in Kampung Pegirian, the farming community in Kampung Yosorejo, the batik labor community in Kampung Jenggot Tengah, and the informal worker community in Kampung Nggodang. Using ethnographic methods, this study addresses the types of social relations that occur in productive activities, which ultimately create poverty rather than prosperity. The study results, interpreted through Henry Bernstein's political economy perspective, indicate that the dynamics of poverty in the City of Pekalongan are constructed through ecological conditions, modes of production, social relations of production, and developmental interventions.

Keywords: Poverty, fishermen, farmers, batik workers, informal workers

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan ekstrem (*extreme poverty*) secara umum dipahami sebagai kondisi ketidakmampuan manusia dalam memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar tersebut meliputi makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, serta akses informasi terhadap penghasilan dan layanan sosial. World Bank (2018) merilis pengukuran kemiskinan ekstrem dunia berdasarkan paritas daya beli sebesar 1,9 Dolar AS. Mengacu pada pengukuran tersebut, pada tahun 2021 kemiskinan ekstrem di Indonesia berada di angka 4% (Harahap, 2023). Berbagai upaya dilakukan untuk mencapai cita-cita global menghapuskan kemiskinan ekstrem pada tahun 2030, termasuk di Kota Pekalongan. Salah satu langkah yang diambil pemerintah adalah dengan pemberian bantuan.

Berdasarkan data P3KE tahun 2023, terdapat 25.498¹ dari 102.575² keluarga di Kota

Pekalongan masuk sebagai penerima bantuan dari pemerintah. Artinya keluarga penerima bantuan mencapai 24%. Keluarga penerima bantuan tersebut secara keseluruhan menyerap 42.428 bantuan, dengan 978 keluarga di antaranya menerima lima jenis bantuan sekaligus. Bantuan ini mencakup Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH), serta Bantuan Sembako.

Angka di atas terbilang tinggi mengingat sasaran penerima bantuan adalah penduduk miskin Kota Pekalongan yang menurut BPS adalah 6,81% pada tahun 2023. Ketidakselarasan tersebut tidak cukup disikapi dengan penyesuaian definisi kemiskinan, karena hal tersebut tetap tidak mengubah kenyataan bahwa istilah kemiskinan yang

Kemiskinan Ekstrem, di Ruang Jlamprang Setda Kota Pekalongan pada 7 Februari 2023.

² Jumlah keluarga di Kota Pekalongan berdasarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan dalam Data Agregat Kependudukan Semester I Tahun 2023.

¹ Jumlah keluarga penerima bantuan di Kota Pekalongan menurut Kemenko PMK Republik Indonesia dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan

digunakan tidak datang dari masyarakat Kota Pekalongan itu sendiri.

Kota Pekalongan merupakan wilayah yang dalam beberapa catatan diakui memiliki potensi besar melalui aset ekonomi dan aset budaya. Batik misalnya, telah berperan penting dalam laju pertumbuhan ekonomi masyarakat sejak tahun 1800-an (McCabe, 2004). Selain itu, perikanan juga menjadi andalan masyarakat sejak abad ke-17, seperti halnya beberapa daerah lain di utara Pulau Jawa (Yuwono, 2001). Dua sektor tersebut menjadi sektor yang paling utama dalam menopang pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan dalam waktu lama, hingga akhirnya kini mampu berdiri sebagai perkotaan yang sibuk. Oleh karena itu, perkembangan masyarakat dan wilayahnya perlu diperhatikan dalam melihat kemiskinan di Kota Pekalongan.

Kemiskinan di Kota Pekalongan harus dilihat sebagai kemiskinan perkotaan, yang ditandai oleh keragaman mata pencaharian tetapi berujung pada kondisi ekonomi yang sama yaitu pada rendahnya penghasilan dan kerentanan ekonomi pekerjanya (Hadi, 2019). Kerentanan merupakan konstruksi sosial, maksudnya keadaan serba rapuh tersebut dibentuk oleh relasi-relasi sosial yang ada. Oleh karena itu, studi ini menanyakan, relasi-relasi sosial seperti apa yang berlangsung dalam kegiatan produktif di Kota Pekalongan, sehingga justru menciptakan kemiskinan alih-alih kemakmuran.

Studi ini memberi batasan pada empat sektor yang menjadi prioritas untuk dilakukan studi kemiskinan dengan analisis sebagai berikut:

- Perikanan merupakan sektor pekerjaan yang sebagian besar diisi oleh rumah tangga miskin. Menurut Goso dan Anwar (2017) terdapat 14,48 juta dari 16,2 juta nelayan di Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan, dengan sebagian besar dari mereka adalah nelayan tradisional. Studi ini mengambil lokasi di Kelurahan Krapyak yang memiliki riwayat sebagai basis nelayan tradisional.³

³ Nelayan tradisional di Kelurahan Krapyak disebut Yuwono (2001) menjual hasil tangkapan ikan di pelabuhan pasca 1924

- Pertanian merupakan sektor pekerjaan sebagian besar rumah tangga miskin di Indonesia. Menurut BPS (2022) terdapat 49,89 persen rumah tangga miskin bekerja di sektor pertanian. Studi ini mengambil lokasi di Kelurahan Kuripan Yosorejo yang menjadi tempat bagi 13% lahan pertanian Kota Pekalongan.⁴
- Industri batik merupakan sektor pekerjaan unggulan yang identik dengan Kota Pekalongan. Pada sektor industri batik, menurut Sari (2011) terdapat banyak buruh batik usia anak yang berasal dari keluarga miskin. Studi ini mengambil lokasi di Kelurahan Jenggot yang menjadi tempat bagi 22% industri batik Kota Pekalongan.⁵
- Serabutan merujuk pada bentuk-bentuk ketidakpastian pekerjaan yang jamak dialami komunitas miskin. Ketika tim melakukan investigasi awal studi lapangan di Kelurahan Kauman, salah seorang warga menyebutkan bahwa di tempat tinggalnya cukup banyak penerima bantuan pemerintah yang bekerja serabutan, termasuk dirinya. Oleh karena itu, studi ini mengambil lokasi di Kelurahan Kauman.

Melalui analisis di atas, studi kemiskinan ini dilakukan pada komunitas nelayan di Kelurahan Krapyak, komunitas petani di Kelurahan Kuripan Yosorejo, komunitas buruh batik di Kelurahan Jenggot dan komunitas serabutan Kelurahan Kauman.

Lebih lanjut, studi ini menggunakan sudut pandang ekonomi politik dengan pengembangan yang dilakukan oleh sejumlah antropolog. Sudut pandang ekonomi politik melihat bahwa kelas dibangun berdasarkan relasi-relasi sosial produksi (Bernstein, 2019). Atas dasar tersebut, konstruksi sosial atas kemiskinan tidak hanya dibahas melalui mode produksi dan relasi sosial produksi, tetapi juga

tidak lagi digunakan sebagai pelabuhan ekspor komoditas dari pedalaman.

⁴ Luas lahan pertanian di Kelurahan Kuripan Yosorejo adalah 109 hektar dari 832 hektar luas lahan pertanian di Kota Pekalongan (Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan, 2022).

⁵ Jumlah industri batik di Kelurahan Jenggot adalah 203 dari 917 industri batik yang terdapat di Kota Pekalongan (Budiyanto, dkk., 2018).

melalui ekologi⁶ dan intervensi pembangunan⁷ suatu komunitas. Adapun lingkup masing-masing pembahasan adalah sebagai berikut:

- **Ekologi:** Tinjauan lingkungan dan sumber daya yang menjadi basis kegiatan produksi di masing-masing lokasi studi. Di sini dibahas jenis dan sifat sumber daya yang menjadi objek produksi.
- **Mode Produksi:** Tinjauan atas kegiatan penciptaan barang dan jasa. Di sini dibahas persoalan siapa mengerjakan apa.
- **Relasi Sosial Produksi:** Tinjauan atas hubungan sosial yang berlangsung dalam kegiatan penciptaan barang dan jasa. Di sini dibicarakan siapa mendapatkan hasil apa.
- **Intervensi Pembangunan:** Tinjauan atas program-program pembangunan yang diarahkan pada kegiatan produksi tersebut dalam rangka meningkatkan kesejahteraan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Di sini dibahas apakah jenis intervensi tersebut tepat dan apakah benefit didistribusi secara merata di kalangan orang yang bekerja di sektor produksi tersebut.

Dengan demikian, sudut pandang ini dapat menunjukkan kemiskinan seperti apa yang dialami masyarakat di Kota Pekalongan, melalui data primer yang diperoleh secara mendalam dengan kerja lapangan (*fieldwork*) dalam skala komunitas.

2. METODE PENELITIAN

Studi kualitatif ini dilakukan selama 10 pekan di 4 lokasi dengan karakteristik komunitas berbeda, yaitu 1) komunitas nelayan miskin di Kampung Pegirian, Kelurahan Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara, 2) komunitas petani miskin di Kampung Yosorejo, Kelurahan Kuripan Yosorejo, Kecamatan Pekalongan Selatan, 3) komunitas buruh batik miskin di Kampung Jenggot Tengah, Kelurahan

Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, dan 4) komunitas serabutan miskin di Kampung Nggodang, Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur.

Pada awal penelitian, tim melakukan wawancara dengan pemerintah di empat kelurahan untuk menentukan kampung fokus studi. Tim kemudian melakukan pengumpulan data melalui pengamatan partisipatif dan wawancara etnografis di setiap kampung. Pengamatan partisipatif dilakukan dengan menceburkan diri dalam situasi sosial komunitas, membangun kedekatan antara tim dan komunitas. Pengamatan partisipatif ini dalam kacamata Spradley (1980) berlangsung dalam tingkatan menengah (*moderate*). Wawancara etnografis dilakukan pada waktu yang disesuaikan dengan aktivitas masing-masing kelompok, seperti pagi dengan nelayan, sore dengan petani, dan malam dengan buruh batik dan serabutan. Hal ini mempertimbangkan perbedaan ketersediaan waktu yang dimiliki informan di masing-masing kampung (Yuwono, 2001). Pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara meliputi kondisi lingkungan, kegiatan produksi, perolehan hasil kerja, dan program pembangunan. Selain itu, kajian literatur dan diskusi kelompok terpumpun juga digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Kajian literatur membantu memastikan dasar, arah, dan hasil studi. Diskusi kelompok terpumpun difasilitasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Pekalongan, melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang memahami isu kemiskinan dan masyarakat di lokasi studi. Melalui diskusi ini, temuan studi diperkuat, dikritisi, dan diverifikasi oleh para pemangku kepentingan.

3. PEMBAHASAN I: KEMISKINAN KOMUNITAS NELAYAN

Ekologi

Ekologi Laut Pekalongan merupakan sumber daya yang menjadi basis kegiatan produksi komunitas nelayan, khususnya oleh nelayan sopek.⁸ Laut Pekalongan yang dimanfaatkan nelayan sopek berstatus sumber

⁶ Narotzky (1997) mengembangkan materialisme historis dengan menempatkan ekologi sebagai produk dari proses sosiohistoris yang menitikberatkan pada pengaruh ruang (*space*) dan sumber daya (*resources*) terhadap kehidupan manusia (*populations*).

⁷ Pengembangan materialisme historis dengan intervensi pembangunan salah satunya dilakukan oleh Nancy Peluso (1994) untuk melihat hubungan kebijakan pertanian dan kehutanan dengan kehidupan masyarakat.

⁸ Nelayan sopek adalah nelayan dengan perahu mesin berukuran sekitar 5 Gross Tonnage (GT).

daya bersama yang bebas diakses oleh siapa saja. Nelayan sopek dari Kampung Pegirian berbagi laut dengan nelayan lain dari berbagai daerah dan berbagai ukuran perahu atau kapal. Pada umumnya, pemanfaatan sumber daya semacam ini cenderung berupa penangkapan sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan kelestarian.

Nelayan sopek mengambil berbagai sumber daya alam hewani di Laut Pekalongan seperti cumi, udang, ikan teri hingga ikan kakap merah. Masing-masing jenis tangkapan memiliki konsentrasi area tersendiri di lautan yang dipahami oleh nelayan sopek. Intensifnya kegiatan penangkapan ikan membuat nelayan bergeser dari berbagi sumber daya menjadi berebut sumber daya. Hasil tangkapan saat ini dirasakan penurunannya oleh nelayan sopek, sehingga mereka rutin berpindah area tangkap untuk menghindari penangkapan berlebih pada satu area.

Kondisi sumber daya di Laut Pekalongan saat ini memiliki keterkaitan dengan dinamika Pelabuhan Pekalongan⁹ dan dinamika komunitas nelayan. Ramainya Pelabuhan Pekalongan oleh komunitas nelayan dimulai pasca statusnya diturunkan dari pelabuhan menengah menjadi pelabuhan kecil pada 1924, sehingga tidak lagi menjadi pelabuhan utama untuk kegiatan ekspor komoditas dari pedalaman. Sejak itu, kegiatan di pelabuhan ini diisi sejumlah nelayan yang menjual hasil tangkapan ikan. Sejak 1955, terdapat program modernisasi nelayan dan pembukaan tempat pelelangan ikan, sehingga sektor perikanan semakin meningkat.

Adanya modernisasi, menurunkan jumlah nelayan yang sebelumnya memiliki dan menggunakan perahu tradisional. Penurunan tersebut tidak hanya karena beralih menggunakan perahu motor, tetapi juga karena beberapa nelayan tradisional beralih menjadi anak buah kapal pukat (*trawl*) atau menjadi nelayan buruh.¹⁰ Berubah menjadi anak buah kapal pukat menjadi pilihan sebagian nelayan tradisional karena penghasilan hariannya

sepuluh kali lebih tinggi (Satria, 2000). Periode kapal pukat diakhiri dengan larangan operasi melalui Keputusan Presiden Nomor 39 tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring Trawl¹¹ karena merusak ekologi laut.

Nelayan buruh yang terdesak, sebagian memilih untuk mengikuti program kredit perahu sopek karena menjadi satu-satunya pilihan masuk akal jika tetap ingin melaut. Perahu sopek merupakan perahu mesin berukuran kecil yang memungkinkan menjangkau area tangkap lebih jauh dan memangkas waktu perjalanan. Bagi mereka yang tidak bertaruh dengan kredit, memilih untuk menjadi tukang jaring (*kiteng*) dengan bekal pengalaman memperbaiki jaring sebelumnya. Riwayat panjang tersebut menjadi dasar komunitas nelayan di Kota Pekalongan saat ini memahami bahwa hasil tangkapan di Laut Pekalongan mengalami penurunan.

Selain mengalami penurunan hasil tangkapan ikan, nelayan sopek di Kampung Pegirian juga juga terbatas dalam kepemilikan faktor produksi yang dimiliki secara pribadi. Perahu mesin berukuran sekitar 5 GT merupakan sarana produksi utama yang mereka gunakan, disertai alat tangkap berupa jaring (*payang*) berbagai ukuran. Perawatan mereka lakukan ala kadarnya karena tidak memungkinkan mengalokasikan penghasilan untuk perawatan maksimal, terlebih dengan biaya solar yang memangkas separuh hasil melaut. Hal ini tercermin dari harga perahu yang mencapai 30.000.000 rupiah dengan penggantian mesin baru seharga 7.000.000 rupiah yang dapat diperlukan sewaktu-waktu. Keterbatasan kepemilikan faktor produksi tersebut memiliki andil dalam kemiskinan yang mereka alami.

Komunitas nelayan di Kampung Pegirian kian jauh dari kemakmuran dengan adanya ketidakpastian untuk dapat melakukan kegiatan produksi setiap hari. Ketidakpastian ini berlaku

⁹ Pelabuhan Pekalongan sekarang dikenal dengan nama Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan (PPNP).

¹⁰ Penggunaan kapal pukat di Kota Pekalongan diawali dengan kedatangan nelayan dari Pulau Sumatra yang membawa kapal tersebut pada 1972.

¹¹ Larangan penggunaan alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan diperkuat melalui Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

baik untuk mereka yang menjadi nelayan sopek, maupun yang menjadi *kiteng*. Nelayan sopek tidak dapat melaut ketika *musim ombak* atau cuaca buruk, sedangkan *kiteng* bergantung pada ada atau tidaknya pesanan untuk memperbaiki jaring. Momen ketika mereka tidak memiliki penghasilan ini dapat memperburuk kemiskinan pada komunitas nelayan di Kampung Pegirian.

Mode Produksi

Nelayan sopek merupakan orang yang paling sibuk dalam kegiatan produksi di Kampung Pegirian. Mereka lebih sering melaut sore dan mendarat pagi daripada melaut pagi mendarat sore. Alasannya, ketika malam ikan akan aktif dan bergerombol di bawah cahaya lampu, sehingga lebih mudah dijaring. Nelayan sopek biasanya bersiap sejak pukul 13.00 WIB dengan membeli solar. Untuk sekali melaut dibutuhkan 25 liter solar yang diperoleh dengan harga sekitar 200.000 rupiah. Harga tersebut bergantung harga solar yang dibeli, karena tidak setiap waktu solar subsidi dapat diperoleh. Pada satu sisi, kebutuhan solar hampir setiap hari, kecuali ketika cuaca buruk (*dino ombak*) datang dan memaksa nelayan sopek untuk tidak melaut.

Nelayan sopek baru melaut sekitar pukul 16.30 WIB setelah seluruh perbekalan siap, jirigen solar diikat di tiang tengah perahu. Satu perahu lazim diisi oleh dua nelayan. Mereka menempuh perjalanan sekitar 90-120 menit, patokan yang digunakan adalah selama daratan masih terlihat dan keberadaan bangunan PLTU Ujungnegero. Mata mereka harus jeli melihat apa yang mungkin ada di bawah permukaan air hingga berjam-jam. Fajar menyingsing merupakan tanda bahwa mereka harus bersiap mendarat. Mereka sampai di darat sekitar pukul 07.00 WIB dan siap menjual hasil tangkapan ikan kepada tengkulak. Kegiatan produksi yang dilakukan oleh nelayan sopek di tengah laut memiliki durasi lebih dari 12 jam, hal ini menunjukkan besaran tenaga yang mereka keluarkan untuk memperoleh penghasilan.

Tengkulak menjadi pihak yang membeli hasil tangkapan nelayan sopek Kampung Pegirian tiap selesai melaut. Kedatangan nelayan sopek ditunggu oleh tengkulak di

galangan. Kegiatan tengkulak berkaitan dengan distribusi, membeli tangkapan nelayan sopek untuk kemudian menjual kembali ke pedagang di pasar. Nominal tangkapan ikan yang dibeli dari tiap perahu sopek sekitar 450.000 rupiah. Adapun sekali berangkat, tengkulak dapat menampung hasil tangkapan ikan dari tujuh perahu sopek atau bahkan lebih. Hal ini menunjukkan bahwa perputaran uang tengkulak lebih tinggi dari nelayan sopek.

Berbeda dengan nelayan sopek yang perlu berbagai sumber daya produksi, tukang jaring atau *kiteng* justru menempatkan dirinya sebagai sumber daya utamanya. *Kiteng* biasa berangkat untuk memperbaiki jaring pukul 07.30 WIB. Jenis-jenis jaring dipahami secara mendalam, mulai dari ukuran lubang hingga material senar. Penghasilan bersih perhari sekitar 95.000 rupiah dengan memperbaiki jaring dari pagi hingga sore. Memperbaiki jaring di malam hari menyulitkan *kiteng* karena perlu kejelian. Adapun ketika *kiteng* tidak memiliki garapan, beberapa dari mereka memperbaiki jaring di lokasi lain untuk sementara waktu, tindakan ini disebut *ngimbat*.

Tidak terdapat jaminan bahwa setiap hari *kiteng* akan memiliki garapan dan penghasilan. Oleh karena itu, tidak jarang istri *kiteng* juga melakukan kegiatan kerja sebagai buruh jahit. Hal ini terlihat dengan adanya mesin jahit di ruang tamu rumah mereka. Mesin jahit tersebut merupakan hasil pinjaman juragan batik yang memberikan garapan (*sanggan*). Kegiatan kerja yang dilakukan perempuan di Kampung Pegirian berperan penting terhadap keberlangsungan hidup keluarga nelayan agar dapat kembali melakukan reproduksi kegiatan penangkapan ikan. Selain itu, temuan ini juga menjadi tanda bahwa pada masyarakat Kampung Pegirian tidak ada norma yang melarang perempuan untuk memperoleh penghasilan. Adapun batasan yang terbaca adalah bahwa kegiatan kerja yang dilakukan perempuan tidak berlangsung jauh di luar kampung, seperti dengan ikut melaut.

Relasi Sosial Produksi

Temuan lapangan menunjukkan bahwa dalam sekali melaut, seorang nelayan sopek biasanya memperoleh penghasilan sebesar

100.000 rupiah. Nominal tersebut berasal dari penjualan hasil tangkapan setelah dikurangi biaya solar dan perbekalan, yang kemudian dibagi dua karena secara umum terdapat dua nelayan dalam satu perahu. Mereka membagi rata uang yang diperoleh karena menilai kegiatan produksi yang dilakukan di satu perahu adalah sama. Sekilas nelayan sopek tampak mandiri dan tidak dieksploitasi secara langsung oleh nelayan juragan, tetapi dalam pandangan Bernstein (2019) mereka adalah kelas yang terbentuk dari relasi sosial produksi. Proses komodifikasi hasil tangkapan ikan telah menaikkan biaya dengan adanya kebutuhan solar dan perawatan peralatan produksi. Risiko dalam kegiatan produksi semakin tinggi karena durasi di lautan semakin lama. Selain itu, persaingan dalam memanfaatkan sumber daya alam semakin tinggi, termasuk bersaing dengan nelayan skala besar. Jika melaut dalam waktu singkat, hasil tangkapan nelayan sopek tidak dapat menutup biaya yang dikeluarkan untuk solar.

Pada dasarnya semua nelayan sopek di Kampung Pegirian telah terdaftar sebagai penerima program solar subsidi. Mereka telah memiliki pas kecil¹² yang rutin diperpanjang, tetapi solar tetap menjadi permasalahan tersendiri yang tidak kunjung tuntas. Pas kecil tetap tidak menjamin mereka untuk memperoleh solar subsidi setiap hari karena kosongnya ketersediaan. Ketika tidak ada solar subsidi, tidak ada pilihan lain selain membeli solar dengan harga lebih tinggi. Hal ini dikarenakan apabila mereka tidak membeli solar, artinya mereka tidak dapat melaut dan tidak memperoleh penghasilan.

Dalam menjual hasil tangkapan, nelayan sopek memiliki daya tawar yang lemah. Nelayan sopek tidak cukup besar untuk mengakses TPI, sehingga mereka menjual kepada tengkulak yang menunggu di bawah pohon dekat galangan. Pertemuan mereka tidak berlangsung lama, hanya sekitar 1 hingga 2 jam. Tengkulak menentukan harga jenis tangkapan ikan dan berhak menolak hasil tangkapan yang kondisinya kurang baik, tidak

ada tawar-menawar di sini. Selalu ada hasil tangkapan yang tidak dibeli oleh tengkulak, baik karena ikan *reject* ataupun ikan rucah. Ikan yang tidak terjual tersebut dibawa pulang oleh nelayan sopek untuk diolah sebagai ikan kering. Biasanya ikan kering tersebut akan dijual ketika *dino ombak* tidak memungkinkan mereka untuk melaut.

Kiteng menjadi bagian dari komunitas nelayan di Kampung Pegirian yang memiliki peran penting di balik kegiatan penangkapan ikan. Mereka memperbaiki jaring yang mayoritas adalah jaring kapal besar. Dari situ, *kiteng* memperoleh upah sekitar 95.000 rupiah dari pemilik galangan atas tugas yang ditunaikan. Sebaliknya, ketika tidak terdapat pekerjaan maka tidak ada upah yang diterima karena status mereka biasanya adalah pekerja lepas. Bernstein (2019) menyebut pekerja lepas sebagai akibat kalahnya mereka dalam persaingan kerja. Dalam konteks *kiteng* di Kampung Pegirian, mereka awalnya adalah nelayan atau keturunan nelayan buruh atau anak buah kapal pukat yang kehilangan pekerjaan serta kalah untuk menjadi nelayan sopek. *Kiteng* bergantung pada keberlangsungan kegiatan penangkapan ikan. Penurunan kegiatan tersebut artinya menurunkan kebutuhan perbaikan jaring, sehingga dapat membawa mereka pada kemiskinan yang lebih jauh.

Intervensi Pembangunan

Intervensi pembangunan yang secara spesifik mengarah pada kegiatan produksi komunitas nelayan di Kampung Pegirian telah berlangsung sejak dahulu. Larangan penggunaan pukat pada 1980 artinya membuat nelayan buruh atau anak buah kapal pukat kehilangan pekerjaan. Program modernisasi perahu sopek bertenaga mesin tidak serta-merta membuat nelayan buruh tersebut kembali melaut sebagai nelayan sopek. Beberapa di antara mereka kalah bersaing dan menjadi *kiteng* dengan status pekerja lepas.

Program solar subsidi dari pemerintah diikuti oleh nelayan sopek di Kampung Pegirian dengan membuat pas kecil yang rutin diperpanjang. Program ini tepat dalam menyoroti salah satu aspek penting kegiatan produksi yang dilakukan nelayan sopek, namun

¹² Pas Kecil adalah Surat Tanda Kebangsaan Kapal yang diperuntukan bagi kapal-kapal dengan tonase kotor kurang dari 7 GT. Surat ini menjadi syarat dalam memperoleh solar subsidi.

belum cukup untuk membawa mereka menuju kemakmuran. Hal ini terkait dengan ketersediaan solar subsidi yang tidak menentu, tidak jarang mereka membeli solar dengan harga lebih tinggi. Adapun ketika nelayan sopek memperoleh solar dengan harga subsidi, rata-rata separuh uang yang diperoleh terpengkas biaya membeli solar untuk sekali melaut.

Intervensi pembangunan lain yang ditemukan adalah inisiasi Yayasan Amanah Kita yang mengembangkan perahu bertenaga surya di Kelurahan Krapyak sejak tahun 2019. Saat ini perahu berukuran 3 GT yang diinisiasi belum dapat menjadi solusi atas tingginya biaya solar terhadap hasil tangkapan, karena biaya pembuatannya yang mencapai 90.000.000 rupiah. Selain itu, kekuatan baterai hanya mampu mengoperasikan perahu 3 hingga 6 jam tanpa sinar matahari. Hal tersebut masih jauh dari kegiatan produksi nelayan sopek di Kampung Pegirian yang dapat mencapai 12 jam.

Program bantuan kapal sempit diterima oleh kelompok nelayan di Kampung Pegirian. Hanya saja para penerima tidak mengetahui status bantuan tersebut hingga saat ini. Beberapa menuturkan bahwa kapal tersebut tenggelam ketika ada yang menyewa. Nelayan tidak tahu harus berbuat apa, terlebih dengan tidak aktifnya kelompok nelayan di Kampung Pegirian.

Selain program yang spesifik mengarah pada kegiatan produksi, komunitas nelayan di Kampung Pegirian juga menerima program pengentasan kemiskinan lain. Program bedah rumah merupakan salah satu program yang tidak sepenuhnya dapat diserap keluarga nelayan miskin. Hal ini disebabkan karena tidak dimilikinya uang untuk membayar buruh bangunan, sedangkan bantuan hanya diperuntukkan untuk bahan bangunan saja. Terdapat beberapa dari mereka yang pernah menerima bedah rumah beberapa tahun sebelumnya, kemudian menolak untuk alokasi selanjutnya. Status program bedah rumah sama dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP), yaitu sama-sama diinginkan, tetapi masih terdapat nelayan miskin yang belum dijangkau. Berbeda dengan Program Keluarga Harapan (PKH) yang

dirasakan secara merata oleh keluarga nelayan miskin karena membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Program lain yang dirasakan manfaatnya secara menyeluruh adalah pengecoran jalan kampung dan penataan saluran air. Temuan lapangan menunjukkan bahwa permukiman di Kampung Pegirian saat ini lebih terlindungi dari banjir dan rob limpasan Sungai Loji. Limpasan Sungai Loji langsung masuk ke saluran air sebelum mencapai permukiman yang ketinggiannya lebih rendah. Selain itu, terdapat permasalahan air yang ditemukan menguat selama studi lapangan, yaitu air bersih dari Pamsimas yang sulit mencapai rumah. Beberapa rumah akhirnya mengandalkan sumur kembali untuk memenuhi kebutuhan air harian.

4. PEMBAHASAN II: KEMISKINAN KOMUNITAS PETANI

Ekologi

Basis dari kegiatan produksi yang dilakukan komunitas petani di Kampung Yosorejo adalah ekologi berupa lahan pertanian. Kepemilikan lahan tidak terdistribusi secara merata kepada petani di Kampung Yosorejo sebab kepemilikan yang bersifat pribadi. Lahan ini menjadi sumber daya alam yang dalam kegiatan produksi diolah menjadi sawah. Hingga kini, sawah di Kampung Yosorejo secara umum menjadi bagian dari 521 ha KP2B atau sawah lestari di Kota Pekalongan. Keberadaan sawah secara luas terlindungi melalui peraturan daerah, tetapi secara pemanfaatan tidak dilakukan komunitas petani sepanjang tahun. Hal ini terkait dengan kondisi lingkungan yang belum maksimal dalam mengelola air. Persoalan keterpenuhan kebutuhan air, bersama dengan perubahan musim, secara umum menjadi salah satu faktor tidak stabilnya produksi pertanian di daerah tropis seperti Indonesia.

Tidak semua petani di Kampung Yosorejo memiliki lahan, sehingga hanya dapat menjadi buruh tani atau menjadi petani penggarap. Lahan yang digarap merupakan hasil lelang lahan sawah pemerintah, kerjasama dengan petani pemilik atau milik juragan tani. Terkait pelekangan, biasanya terdapat pembagian rata antarpetani penggarap yang diatur tiap tahunnya

oleh paguyuban tani setempat. Lelang lahan pemerintah ini dilakukan di kantor kelurahan. Selain itu, terdapat pula beberapa yang sebelumnya memiliki lahan dan dijual. Kasus dijual tersebut berkaitan dengan hasil yang semakin tidak memungkinkan untuk dilakukan reproduksi, dalam bahasa Bernstein (2019) mereka terdesak oleh beragam pengeluaran hingga rente.

Petani menjadi sumber daya manusia utama yang melakukan pemanfaatan luasnya sumber daya alam sawah di sekitar Kampung Yosorejo. Pengetahuan, teknik dan strategi dalam kegiatan pertanian padi utamanya mereka peroleh secara turun-temurun. Persoalan sulitnya air ketika musim kemarau diatasi mereka dengan membiarkan sawah tidak ditanami padi, belum ada stimulus pihak luar yang mereka terapkan secara berkelanjutan agar dapat melakukan pemanfaatan sumber daya alam sawah sepanjang tahun. Sebelumnya, mereka pernah menanam jagung, namun tidak berlanjut karena belum dipahaminya akses pemasaran secara pasti oleh sumber daya manusia yang ada. Sumber daya manusia petani di Kampung Yosorejo menerima dan menerapkan stimulus yang membawa mereka pada kepastian, seperti dalam hal pemberian modal dan bantuan, serta modernisasi alat bertani.

Selain itu, kegiatan pertanian di Kampung Yosorejo juga didukung oleh kepemilikan faktor produksi lain berupa peralatan bertani. Peralatan ini ada yang merupakan kepemilikan sendiri seperti cangkul, tangki semprot dan alkon, serta ada pula peralatan yang sewa seperti traktor atau alat pemanen. Untuk menunjang kebutuhan air sawah, komunitas petani di Kampung Yosorejo tidak semata-mata mengandalkan air dari Irigasi Grabyak, karena tidak adanya kepastian ketersediaan yang berisiko membuat mereka gagal panen. Oleh karena itu, sumur menjadi sumber daya produksi dalam memenuhi kebutuhan air sawah di Kampung Yosorejo.

Mode Produksi

Buruh tani merupakan orang yang paling sibuk dalam kegiatan produksi di Kampung Yosorejo. Buruh tani pada dasarnya merupakan

orang yang diminta oleh juragan tani selaku pemilik lahan, untuk menggarap lahannya. Mereka biasanya menggarap sawah milik juragan tani di Kampung Yosorejo. Jam kerja buruh tani cenderung sama setiap harinya, yakni berangkat pukul 07.00 WIB dan pulang sekitar pukul 16.00 WIB. Berbeda dengan juragan tani yang tidak perlu ke sawah karena andilnya dalam kegiatan produksi sudah mewujud pada lahan dan modal.

Dalam hal tahapan bertani, baik petani penggarap maupun buruh tani mula-mula akan menyiapkan bedeng bagi benih (*wenih*) yang sudah direndam. Setelah itu sawah utama akan dibajak dan disiapkan aliran air sebagai tempat benih yang siap tanam setelah 25 hari. Setelah tiga minggu, benih bisa dicabut dari bedengan dan mulai ditanam (*tandur*) di sawah dengan disertai jarak agar nantinya ternutrisi dengan baik. Setelah masa tanam selesai, maka tugas petani penggarap dan buruh tani selanjutnya adalah menyiangi tanaman (*matun*) di sekitar padi yang berpotensi merusak padi. Selain itu, dalam masa menunggu panen sekitar tiga bulan usia tanam, petani penggarap dan buruh tani juga memberikan pupuk dan membasmi hama. Adapun pupuk yang digunakan di Kampung Yosorejo adalah Phonska.

Upah perhari yang peroleh seorang buruh tani di Kampung Yosorejo adalah 100.000 rupiah. Jumlah tersebut tidak berubah baik berstatus buruh tani lepas maupun buruh tani kontrak. Bedanya ketika menjadi buruh tani kontrak terdapat tambahan makanan, minuman dan rokok.

Berbeda dengan buruh tani, petani penggarap harus menunggu gabah terjual untuk memperoleh penghasilan. Risiko mereka lebih tinggi karena dalam tiap masa tanam selalu ada potensi gagal panen. Dalam satu tahun, petani penggarap dan buruh tani di Kampung Yosorejo mengalami dua kali masa panen. Mereka membiarkan sawah tidak diolah selama beberapa bulan pada musim kemarau karena sulit memperoleh air. Sawah benar-benar dibiarkan begitu saja. Masyarakat menyebutnya dengan istilah *bero*, yaitu sistem pembiaran lahan untuk menghindari gagal panen akibat kekeringan, sekaligus teknik alami memulihkan nutrisi yang ada di dalam tanah. Masa rehat

semacam ini tidak hanya menjadi sisi rentan petani penggarap, tetapi juga buruh tani di Kampung Yosorejo. Keberadaan Irigasi Gebyak tidak membantu memastikan sawah teraliri air sepanjang tahun. Turunan dari ketidakpastian tersebut salah satunya mewujud pada pilihan beberapa buruh tani untuk beralih menjadi buruh bangunan.

Relasi Sosial Produksi

Sebagai orang yang memperoleh penghasilan dari sistem upah, buruh tani otomatis menjalin relasi sosial produksi dengan pemberi upah, dalam hal ini adalah juragan tani. Hitungan upah yang digunakan adalah harian, dengan sifat ikatan terbagi antara kontrak dan lepas. Buruh tani kontrak lebih terjamin karena ditugaskan untuk menyelesaikan satu masa tanam hingga panen, sedangkan buruh tani lepas baru dipanggil untuk bekerja ketika diperlukan.

Buruh tani di Kampung Yosorejo memiliki pengetahuan yang kuat terkait karakteristik pertanian setempat. Hal ini diperoleh secara turun-temurun ditambah pengalaman selama bertahun-tahun. Saat ini peluang mereka semakin kecil dan terancam dengan kecenderungan beberapa juragan yang memilih buruh tani dari luar daerah. Beberapa yang lebih beruntung menjadi petani penggarap lahan pemerintah yang diperoleh secara lelang. Oleh karena itu, profil komunitas miskin di Kampung Yosorejo identik dengan petani penggarap dan buruh tani.

Jumlah buruh tani yang menjalin relasi sosial produksi dengan juragan tani kini tidak sebanyak dahulu. Relasi keduanya tidak memberi rasa aman bagi buruh tani untuk menghadapi kehidupan. Beberapa buruh tani memilih beralih menjadi buruh bangunan. Hal ini berkaitan dengan ketidakpastian kegiatan kerja sepanjang tahun. Turunan dari fenomena tersebut adalah semakin banyaknya buruh tani dari luar daerah yang dikontrak oleh juragan tani. Kontrak tersebut bahkan disertai fasilitas tempat tinggal. Berbeda dengan buruh tani Kampung Yosorejo, buruh tani dari luar daerah tidak jarang masih memiliki atau mengelola binatang ternak sebagai aset sekaligus sumber penghasilan tahunan yang terbilang besar.

Selain itu, dalam kegiatan pertanian, beberapa petani penggarap ataupun petani pemilik penggarap tidak jarang mengalami kendala dalam hal modal produksi. Untuk itu, mereka yang memiliki modal terbatas atau bahkan tidak memiliki modal kemudian melakukan praktik utang. Relasi utang tersebut terjalin dengan pemilik *rice mill*, tempat yang mereka gunakan untuk proses pengolahan hasil panen padi. Hal ini kemudian melahirkan kontrak tidak tertulis bahwa mereka harus menjual gabah hasil panen kepada pemilik *rice mill* yang bersangkutan.

Intervensi Pembangunan

Pembangunan dan bantuan yang diberikan di Kampung Yosorejo kepada komunitas miskin secara umum dinilai efektif. Namun, bantuan yang ditujukan untuk sektor pertanian justru dianggap tidak berhasil. Contohnya, sumur yang dibangun oleh pemerintah akhirnya mengalami kerusakan karena spesifikasinya tidak sesuai. Penyediaan pupuk subsidi juga terus berkurang, dan kendala dalam penyediaan alat combi yang tidak sesuai dengan permintaan serta spesifikasi lapangan menjadi masalah. Selain itu, perbaikan pengairan belum dilakukan. Di sisi lain, bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dianggap tepat sasaran dan memberikan manfaat yang dirasakan oleh warga.

Salah satu perhatian utama komunitas petani, adalah kebijakan sawah lestari. Meskipun kebijakan ini memiliki niatan positif dalam melestarikan lahan sawah, tetapi kurang mempertimbangkan fasilitas pendukung kehidupan sawah, seperti sistem pengairan. Komunitas merasa bahwa kebijakan ini memberikan beban tambahan, mengingat mereka yakin bahwa lahan sawah yang dimiliki dapat lebih menguntungkan jika digunakan untuk tujuan lain.

5. PEMBAHASAN III: KEMISKINAN KOMUNITAS BURUH BATIK

Ekologi

Kampung Jenggot Tengah merupakan kawasan permukiman padat penduduk yang tidak hanya terdiri dari rumah, tetapi juga

pranggok dan pertokoan. *Pranggok* merupakan tempat berlangsungnya kegiatan produksi batik yang dilakukan buruh batik yang kepemilikannya bersifat pribadi, bisa milik juragan batik dan bisa juga milik *maklon*. Itu bukan tempat kosong, di dalamnya terdapat berbagai peralatan produksi dengan total nilai puluhan hingga ratusan juta rupiah.

Kegiatan produksi industri batik beserta industri tekstil lain turut melatarbelakangi perubahan kondisi lingkungan di sekitar kampung ini. Sungai Setu kini tidak dapat diandalkan sebagai sumber air untuk mandi dan mencuci, karena tercampur dengan limbah industri. Bahkan limbah industri pernah mencemari sumur pribadi, yang kemudian diselesaikan secara cepat dan dengan cara damai antara pihak juragan batik dengan pihak terdampak. Selain itu, kegiatan keislaman juga marak digelar di sini. Sangat mudah menemui keramaian anak-anak mengaji di sore dan malam hari, serta tidak jarang terlihat kegiatan majelis orang dewasa.

Buruh batik merupakan sumber daya manusia yang paling mudah ditemui di Kampung Jenggot Tengah, termasuk di dalamnya *kuli keceh*, *maklon* dan buruh jahit. Masing-masing dari empat itu seringkali dibedakan kembali berdasarkan tingkat kemahiran dan pengalaman, yang kemudian diikuti dengan perbedaan upah. Banyaknya jumlah mereka, tumbuh bersama pertumbuhan industri batik di Kota Pekalongan, khususnya ketika teknik tulis mulai bergeser ke teknik cap dan teknik sablon untuk meningkatkan skala produksi. Hal ini ditunjang dengan semakin mudahnya akses ke sumber daya lain, yaitu bahan baku lilin (*gondo*) dan kain.

Seperti buruh pada umumnya, buruh batik tidak memiliki sarana produksi sendiri. Kegiatan produksi yang mereka lakukan harus menggunakan sarana produksi milik orang lain. Tenaga dan keterampilan adalah dua hal yang mereka andalkan. Mereka yang memiliki sarana produksi sendiri disebut dengan istilah *maklon* atau *buruh mbabar*. *Maklon* biasa mengajak buruh batik lain untuk bekerja bersama dengan besaran upah yang bergantung pada jumlah pesanan yang diterima dan harga yang disepakati.

Adapun peralatan yang digunakan dalam kegiatan produksi tersebut di antaranya adalah cap batik yang umumnya berbahan tembaga, kayu atau aluminium. Terdapat pula plangkan sablon yang dapat mencapai lebar 1,2 meter dan panjang 2,5 meter. Fungsinya plangkan sablon adalah sebagai cetakan motif, baik yang dituangkan nantinya adalah pewarna maupun malam. Peralatan tersebut merupakan peralatan pokok yang perlu didampingi meja, kompor, loyang, malam, kain, pewarna dan beberapa penunjang lain. Selain itu, bagi mereka yang terlibat sebagai buruh jahit biasanya memiliki mesin jahit sebagai sarana produksi. Mesin jahit tersebut umumnya adalah hasil pinjaman dari juragan batik atau juragan konveksi.

Mode Produksi

Kegiatan produksi yang dilakukan oleh buruh batik bergantung pada ada atau tidaknya *sanggan*. Lebih spesifik buruh batik memproduksi motif batik pada kain atau pakaian dengan peralatan yang tersedia di *pranggok* dan bukan untuk stok atau dijual sendiri. Mereka ada yang mengerjakan *sanggan* langsung dari juragan batik yang memiliki *pranggok* sekaligus memasarkan, dan ada pula yang mengerjakan *sanggan* dari *maklon*. Kegiatan produksi yang dilakukan di *pranggok* pada dasarnya berbahaya bagi kesehatan karena bersentuhan langsung dengan bahan kimia, sedangkan buruh batik bekerja dengan perlengkapan keamanan dan kesehatan yang minim.

Saat ini terdapat batik sablon dan batik sablon malam. Plangkan yang digunakan berbeda, sebab plangkan yang digunakan untuk batik sablon malam harus tahan panas. Perbedaan selanjutnya adalah dalam proses, batik sablon malam memakan waktu lebih lama, karena ada proses pewarnaan menyeluruh (*nyelup*) setelah kain disablon malam, dilanjutkan merontokkan malam (*nglorod*) setelah warna kering. Adapun orang yang bertanggung jawab dalam proses ini bukan buruh sablon, tetapi *kuli keceh*.

Kain batik hasil produksi kemudian ada yang masuk tahap distribusi dan pemasaran, ada pula yang diproses kembali menjadi produk jadi. Umumnya proses ini melibatkan buruh jahit. Tidak jarang seorang buruh jahit adalah

istri dari seorang buruh batik atau *kuli keceh*. Beberapa buruh jahit di Kampung Jenggong Tengah memiliki mesin sendiri, tetapi tidak jarang pula yang mesin jahitnya adalah hasil pinjaman dari juragan batik pemberi *sanggan*. Buruh jahit paham betul jenis-jenis teknik menjahit seperti *niketi*, *nepung*, *njilid*, hingga *piding*. Bagi mereka yang sudah memasuki usia lanjut, keterampilan dan *sanggan* seringkali diteruskan oleh keturunannya. Kegiatan produksi tersebut disepakati secara tidak tertulis oleh industri batik di Kota Pekalongan untuk berhenti di hari Kamis untuk pengupahan (*pocokan*) dan libur di hari Jumat.

Selain juragan batik, terdapat *maklon* yang memiliki tempat dan peralatan produksi. Ia bersama beberapa buruh batik mengerjakan pesanan dari pihak luar, baik makelar batik maupun juragan batik. Keberadaan *maklon* saat ini semakin banyak. Keputusan untuk menjadi *maklon* seringkali tidak terlepas dari garapan yang sepi sebagai buruh batik. Dengan menjadi *maklon*, mereka dapat mencari garapan sendiri, menurunkan harga atau menurunkan minimal produksi agar orang tertarik untuk memesan. Selain menjadi *maklon*, juga terdapat buruh batik yang mulai melirik peluang sebagai kuli bangunan karena peluang dan hasilnya dinilai lebih baik.¹³ Kedudukan *maklon* dalam analisis Bernstein (2019) paralel dengan petani menengah yang sekilas terlihat sebagai cerminan kegiatan produksi yang mandiri, tetapi pada dasarnya sama-sama kelas yang dibentuk dalam relasi sosial produksi. Artinya *maklon* terlihat sebagai produsen yang mandiri karena mencari *sanggan* hingga melakukan kegiatan produksi dengan peralatan sendiri, tetapi pada dasarnya ia merupakan kelas bentukan relasi sosial produksi dalam industri batik yang melakukan akumulasi kapital dan menampung buruh batik tanpa juragan.

Relasi Sosial Produksi

Temuan lapangan menunjukkan bahwa dalam sehari, upah yang diterima oleh buruh batik adalah sekitar 90.000 rupiah. Nominal tersebut biasanya diterima oleh buruh batik dengan spesialisasi menyablon atau mengecap

dari juragan batik yang menggunakan skema upah harian. Selain upah harian, buruh batik tidak jarang menerima upah dengan skema produktivitas, antara perlembar atau perkodi. Misalnya untuk mengecap rok buruh batik menerima 1.000 rupiah perlembar. Adapun dalam satu hari, jumlah rok yang selesai dicap adalah 80 lembar, sehingga dalam satu hari dapat menerima 80.000 rupiah.

Skala usaha juragan batik di Kota Pekalongan sebagian besar tidak mencapai kriteria yang diharuskan untuk menerapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Hal ini membuat relasi antara juragan batik atau *maklon* pemilik *pranggok* dengan buruh batik, termasuk *kuli keceh*, tidak dilindungi oleh peraturan dan kewajiban yang mengikat. Misalnya ketika *pranggok* tidak ada *sanggan* atau hujan turun, buruh batik diberi kabar untuk libur tanpa kompensasi apapun.

Meliburkan buruh batik pada dasarnya dihindari oleh juragan batik. Juragan batik lebih memilih untuk memangkas hari kerja buruh batik mereka. Misalnya dari yang semula 6 hari menjadi 3 hari, sehingga kegiatan produksi tidak benar-benar berhenti. Buruh batik tetap saja merasa tidak tenang dengan pemangkasan hari kerja tersebut. Beberapa dari mereka memilih mencari *pranggok* lain, dan tidak jarang kemudian tidak kembali ke *pranggok* lama. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan antara buruh batik dengan juragan batik dapat dengan mudah diputus, termasuk dari sisi buruh batik itu sendiri sebagai bentuk resistensi atas keadaan yang tidak pasti.

Utang juga sering mewarnai relasi sosial produksi antara buruh batik dengan juragan batik. Biasanya skema angsuran yang diterapkan adalah dengan pemotongan upah oleh juragan batik. Terdapat beberapa kejadian terkait utang yang tidak dilunasi oleh buruh batik dengan cara kabur atau menghilang begitu saja. Sebagai respons, nama buruh batik tersebut tersebar di kalangan juragan batik maupun *maklon* dan menjadi catatan khusus yang memperkecil peluang buruh batik itu untuk memperoleh pekerjaan kembali.

Ketika seorang buruh batik tidak memiliki *pranggok* tetap ataupun *sanggan*, biasanya ia akan mencari informasi kebutuhan buruh batik

¹³ Selain menjadi kuli bangunan, menurut Kadarwati (2009) buruh batik juga mempertimbangkan peluang sebagai pedagang.

di *pranggok* lain. Informasi tersebut dapat datang dari buruh jahit atau buruh batik yang mereka kenal. Selain itu, mereka juga memiliki cara lain untuk segera memperoleh *sanggan*, yaitu dengan mangkal di pertigaan Bendo. Tempat ini sering pula disebut dengan istilah "Bursa Kerja". Mangkal dilakukan pada pagi hari mulai pukul 06.00 WIB hingga pukul 10.00 WIB, dan di antara waktu tersebut perwakilan juragan batik hingga *maklon* akan datang mencari buruh batik atau *kuli keceh* yang cocok dengan kebutuhan dan harga. Terdapat perbedaan lokasi mangkal yang menjadi penanda, yaitu buruh batik, baik cap atau sablon, mangkal di dekat makam, sedangkan *kuli keceh* mangkal di dekat lampu lalu lintas.

Pertukaran informasi terkait *pranggok*, baik besaran upah maupun fasilitas, dalam beberapa kesempatan menjelma menjadi fenomena *bong-bongan*. *Bong-bongan* adalah tindakan memanas-manasi sesama buruh batik, baik dari *pranggok* yang sama maupun berbeda. Implikasi dari fenomena ini adalah munculnya keinginan buruh batik untuk pindah karena tertarik dengan gambaran bekerja di *pranggok* lain, bisa karena lebih santai atau upah lebih tinggi.

Intervensi Pembangunan

Intervensi pembangunan yang langsung mengarah pada kegiatan produksi batik berkaitan dengan riwayat kemunculan industri batik. Sejak dahulu Kampung Jenggot Tengah dan beberapa kampung disekitarnya terkenal dengan karakteristik santri. Kehidupan santri cenderung mengandalkan sektor industri batik sebagai sumber penghasilan. Pada 1960 masih terdapat kegiatan pengrajin batik tulis setiap hari. Satu hingga dua dekade setelahnya, beberapa orang mulai meningkatkan skala produksi dengan menggunakan teknik sablon (*printing*). Hal ini tidak terlepas dari ambisi pemerintah untuk meningkatkan perekonomian melalui UU Penanaman Modal Asing tahun 1967 dan UU Penanaman Modal Dalam Negeri tahun 1968 (Hayati, 2012). Sejak saat itu, banyak pengrajin batik yang kalah bersaing mulai beralih menjadi buruh batik, termasuk mereka yang tinggal di kampung ini.

Program lain yang mengarah pada kegiatan produksi batik berkaitan dengan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal yang disebut "Batik Berlian". Selama studi lapangan, tidak ditemukan buruh batik yang menerima program tersebut, bahkan belum diketahui oleh mereka. Begitu pula jenis bantuan yang terdaftar dalam DTKS, hanya ditemukan penerima BST. Rumah bercap PKH juga jarang ditemukan di lokasi studi, justru salah satu penerima PKH yang ditemukan di lapangan adalah keluarga mantan Ketua RT. Satu program yang ditemukan menguat adalah KIP yang diminati oleh komunitas buruh batik karena dilihat sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan.

Program bedah rumah menjadi program lain yang tersampaikan dengan baik kepada keluarga buruh batik miskin di Kampung Jenggot Tengah. Mereka menjelaskan bahwa prosesnya tidak rumit dan dapat berkelanjutan, misalnya tahun ini menerima bantuan perbaikan atap, apabila lantai perlu perbaikan maka dapat dialokasikan pada tahun berikutnya.

6. PEMBAHASAN IV: KEMISKINAN KOMUNITAS SERABUTAN

Ekologi

Komunitas serabutan di Kampung Nggodang memaksimalkan sumber daya apapun yang mereka miliki sendiri atau dapat mereka akses, utamanya terkait sumber daya sosial. Relasi sosial mereka upayakan untuk dikonversi menjadi dukungan sosial dan kerjasama yang membawa keuntungan. Hal ini sejak dahulu memainkan peran penting dalam perubahan kegiatan produktif mereka.

Pada 1945, masyarakat sudah menyebut tempat ini sebagai Kampung Nggodang. Nama Kampung Nggodang sering dikaitkan dengan ungkapan "*gudange wong, luru wong opo bae ono ning kene.*" Masyarakat luar mengaitkan penamaan ini dengan tersedianya berbagai latar belakang pekerjaan masyarakat di kampung ini. Selain itu, terdapat pula yang mengaitkan penamaan tersebut dengan karakteristik permukiman yang keteraturannya tidak sebaik permukiman Kampung Kajen di sebelahnya.

Ekologi di sini telah sesak dengan rumah dan memiliki beberapa permasalahan. Banjir

rob rembesan adalah salah satu permasalahan yang ada. Terletak sekitar 3,5 km dari bibir pantai, kampung ini terdampak banjir rob akibat rembesan dari Sungai Loji. Permasalahan ini muncul sejak proyek tanggul pesisir di pantai utara Kota Pekalongan dibangun pada tahun 2019. Hal ini menyebabkan perubahan pola hidup komunitas serabutan yang harus beradaptasi dengan banjir rob, termasuk dengan membangun rumah dua lantai. Selain itu, dampak banjir rob juga meningkatkan kerentanan komunitas serabutan miskin. Mereka harus siap menghadapi pengeluaran yang tidak terduga, seperti perbaikan rumah, kendaraan, atau barang-barang yang rusak akibat rob rembesan.

Komunitas serabutan di Kampung Nggodang memiliki keterbatasan kepemilikan sumber daya dan peralatan produksi. Mereka tidak memiliki lahan pribadi yang dapat diolah. Begitu pula potensi sumber daya milik umum di sekitar, tidak ada yang memungkinkan untuk diakses oleh mereka. Misalnya, benar bahwa laut terbuka bagi siapapun, tetapi komunitas serabutan di sini tidak memiliki sarana produksi dan sumber daya manusia yang memungkinkan untuk menjadi nelayan sopek. Dari situ dapat dipahami bahwa karakteristik komunitas serabutan adalah penempatan diri sendiri sebagai sumber daya dalam kegiatan produksi.

Keterbatasan tersebut disadari oleh mereka. Beberapa di antaranya kemudian mengambil jalan alternatif di sektor informal dengan sarana produksi umum, murah dan sederhana, seperti tukang ojek, tukang becak, hingga tukang parkir. Adapun preferensi komunitas serabutan, khususnya laki-laki, secara berurutan adalah sebagai buruh pabrik, buruh bangunan, buruh batik dan wiraswasta. Satu yang pertama berkaitan dengan kepastian penghasilan, dua selanjutnya berkaitan dengan sarana produksi yang paling memungkinkan dan penghasilan yang jelas, serta satu yang terakhir menjadi pilihan yang lebih menjanjikan apabila memiliki modal.

Mode Produksi

Kegiatan produktif serabutan berkaitan dengan pemaksimalan sumber daya apapun yang mereka miliki sendiri atau yang dapat

mereka akses, utamanya terkait sumber daya sosial. Perubahan dan dimilikinya kegiatan produktif oleh mereka, bergantung pada eksistensi relasi sosial. Ketika suatu relasi sosial yang dimiliki tertutup atau tercabut, maka hilang pula peluang mereka untuk melakukan konversi relasi sosial menjadi dukungan sosial dan kerjasama menguntungkan. Apapun yang mereka miliki, sebisa mungkin dapat menjadi sumber daya yang mampu memberikan mereka penghasilan, termasuk ponsel pintar (*smartphone*) dan sepeda motor. Selain itu, sumber daya manusia perempuan juga banyak yang terlibat kegiatan produktif seperti dengan menjadi penjual makanan hingga buruh jahit.

Tidak sulit menemukan seorang serabutan di Kampung Nggodang. Beberapa dari mereka biasanya memiliki kegiatan rumah seperti antar-jemput anak sekolah dan istri belanja. Mereka tidak memiliki pengalaman terkait keahlian spesifik. Mereka mengandalkan peluang yang ada di kawasan kios semi-permanen pedagang alun-alun, sebagai apapun mereka berkenan. Menata tenda kios, menjaga kios, menata parkir, penitipan peralatan pedagang, hingga kebersihan menjadi beberapa pilihan yang tersedia. Relokasi pedagang ke Pasar Sugihwaras tidak serta-merta menyertakan peluang serupa, sehingga komunitas serabutan tercabut (*displaced*) dari sumber penghasilan yang diandalkan selama bertahun-tahun. Beruntungnya mereka memiliki sumber daya sosial yang dimanfaatkan untuk menjadi perantara penjualan, dalam kata lain bekerja sebagai makelar.

Gang menjadi ruang interaksi bagi masyarakat di sini, sekaligus saling berbagi peluang. Ketika terdapat peluang menjadi kuli bangunan, masyarakat akan cenderung mengambilnya. Alasannya, saat ini penghasilan harian kuli bangunan sama tingginya atau bahkan lebih tinggi dari nelayan, *kiteng*, buruh tani dan buruh batik, tetapi lebih dapat menerima latar belakang mereka. Selain itu, dengan mengambil peluang menjadi kuli bangunan, biasanya keterjaminan penghasilan mereka akan lebih panjang. Hal ini dikarenakan sifat proyek pembangunan yang hampir tidak mungkin selesai dalam satu hari.

Selain serabutan dalam sektor jasa, masyarakat miskin di Kampung Nggodang juga terdapat yang bekerja serabutan dalam sektor dagang. Tidak jarang mereka bergonta ganti sumber penghasilan atau “bisnis” dan kembali “*rungkad*”. Salah satunya berdagang pakaian *online* yang dibeli secara grosir dari toko juragan batik. Namun, mereka merasa berdagang pakaian *online* sudah tidak menjanjikan, karena tidak dapat bersaing dengan harga toko *online* milik juragan batik tempatnya mengambil barang.

Peran perempuan dalam kehidupan komunitas miskin di kampung ini layak mendapat perhatian. Mereka menjadi sosok yang mampu menjadi penyeimbang melalui kegiatan produksi yang dilakukan, dengan menjual makanan dan menjadi buruh jahit.

Relasi Sosial Produksi

Lazimnya komunitas miskin di Kampung Nggodang menjalin relasi sosial produksi dengan pihak-pihak lain di luar Kelurahan Kauman. Informasi dari pengusaha luar kampung disebarkan secara spontan sesama komunitas serabutan. Informasi pekerjaan sebagai buruh bangunan misalnya, termasuk dari luar Kota Pekalongan, seringkali mereka terima. Bahkan terdapat serabutan yang hanya memiliki sepeda sebagai alat transportasi, bersepeda untuk bekerja sebagai buruh bangunan dari Kampung Nggodang hingga Kelurahan Pekajangan di Kabupaten Pekalongan.

Banyak pertokoan di sekitar, tetapi yang direkrut cenderung dari daerah yang lebih jauh. Hal ini disadari pemuda Kampung Nggodang bahwa daya tawar masyarakat untuk memperoleh pekerjaan begitu rendah dan tidak diperhitungkan. Mereka kemudian membentuk semacam wadah kerukunan pemuda yang disebut ARMADA, akronim dari Anak Remaja Kauman Nggodang. Berbagai kegiatan positif diinisiasi untuk kebaikan kampung, salah satunya dengan membersihkan dan mengecat gang kampung dengan harapan mengangkat kesan kumuh dan negatif, serta meningkatkan daya tawar dan kepercayaan masyarakat luar terhadap masyarakat kampung ini. Dengan demikian serabutan di Kampung Nggodang

pada dasarnya sama dengan apa yang disebut Bernstein (2019) sebagai pekerja lepas, dan disebut Standing (2011) sebagai *precariat*. Keduanya sama-sama muncul akibat kalah dalam persaingan tenaga kerja dan memiliki ketidakpastian yang tinggi dalam hal sektor, waktu, hingga jaminan keselamatan.

Pemanfaatan sumber daya sosial yang mereka miliki salah satunya dilakukan dalam bentuk kegiatan makelar. Makelar di Kampung Nggodang tidak terbatas pada jual beli kendaraan atau tanah, tetapi juga meliputi makelar untuk pesanan produk batik. Skema yang digunakan adalah dengan mengantar pembeli ke juragan batik, tanpa macam-macam mengatur harga. Dengan dibawanya pembeli, juragan batik memberikan komisi di belakang transaksi dengan pembeli, yang bahkan tanpa sepengetahuan pembeli. Relasi sosial produksi ini merupakan salah satu bentuk ketahanan yang muncul dengan dimilikinya sumber daya sosial oleh serabutan di kampung ini.

Intervensi Pembangunan

PKH merupakan program yang paling banyak diterima oleh komunitas serabutan di Kampung Nggodang. Bantuan jenis ini membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar. Selain itu, terdapat program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang masih sulit diakses oleh serabutan. Mereka terhalang beberapa ketentuan terkait penghasilan dan utang berjalan. Padahal kebutuhan rumah bagi mereka cukup mendesak karena sebagian besar rumah terdampak rob rembesan yang rutin dialami hampir tiap bulan, terlebih ketika musim hujan. Terlebih dengan padatnya penduduk, sangat mudah menemui satu rumah yang terdiri dari dua kepala keluarga.

Permukiman yang dibayang-bayangi oleh rob rembesan Sungai Loji dapat memperburuk kemiskinan yang mereka alami. Hingga kini belum ada program yang mereka ketahui dalam rangka melindungi kampung dari banjir tahunan dan rob rembesan sungai yang dialami setiap bulan.

Pada lain sisi, pemuda di Kampung Nggodang telah mengakses program pengembangan kompetensi kerja melalui Kartu Prakerja. Beberapa dari mereka yang

memanfaatkan ini adalah anak dari serabutan, dan kini menjadi tulang punggung dengan bekerja di perusahaan dengan upah di atas Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

7. KESIMPULAN

Berikut kesimpulan terkait kemiskinan pada komunitas nelayan tangkap:

- Komunitas nelayan mengalami penurunan sumber daya laut dan peningkatan biaya produksi yang menyebabkan hasil yang diperoleh banyak terpankas, khususnya biaya solar yang memangkas separuh penghasilan mereka.
- Komunitas nelayan sopek harus melakukan kegiatan produksi hingga 12 jam tiap melaut agar hasil tangkapan lebih banyak, yang kemudian dijual hanya pada satu tengkulak tanpa persaingan harga. Kegiatan produksi tidak dapat dilakukan ketika musim ombak.
- Komunitas nelayan sopek membagi rata hasil tangkapan dengan rata-rata tiap orang memperoleh 100.000 rupiah sekali melaut, sedangkan kiteng diupah harian 95.000 rupiah jika bekerja. Mereka merupakan komunitas miskin yang lahir karena kalah dan terdesak oleh modernisasi, persaingan kerja dan perebutan sumber daya.
- Komunitas nelayan menerima program bantuan kapal, solar subsidi, penanggulangan rob limpasan, hingga PKH, namun praktiknya belum maksimal dan belum menyentuh akar persoalan.

Berikut kesimpulan terkait kemiskinan pada komunitas petani:

- Komunitas petani mengolah sawah yang dilindungi luasannya, namun tidak dapat produktif sepanjang tahun karena sulitnya pemenuhan air dan mahal biaya produksi. Sebagian lahan kemudian diakumulasi oleh petani kaya.
- Komunitas buruh tani tidak menggarap sawah ketika musim bero, serta terdesak pilihan juragan tani untuk mempekerjakan buruh tani dari luar daerah. Adapun beberapa petani menggarap sawah pemerintah, yang modal produksinya

seringkali harus sewa dan utang ke pemilik rice mill.

- Komunitas buruh tani diupah harian 100.000 jika bekerja, dengan ikatan kontrak hingga panen ataupun panggilan lepas. Petani penggarap yang utang modal produksi ke pemilik rice mill, menjual gabah kepadanya.
- Komunitas petani diberi bantuan sarana produksi yang fungsi dan/atau spesifikasinya belum sejalan dengan kebutuhan dan pemahaman.

Berikut kesimpulan terkait kemiskinan pada komunitas buruh batik:

- Komunitas buruh batik menjadi sumber daya produksi dalam industri batik yang berawal dari terlibasnya pengarjin batik dengan adanya industrialisasi batik 1970-an. Mereka bergantung pada aktifnya pranggok milik juragan batik dan maklon.
- Komunitas buruh batik berpotensi mengalami masalah kesehatan karena melakukan kegiatan produksi yang bersentuhan langsung dengan bahan kimia tanpa perlindungan yang memadai. Mereka tidak bekerja ketika musim hujan atau ketika tidak ada sanggan.
- Komunitas buruh batik menerima distribusi upah harian yang timpang dengan pemilik modal. Besaran upah harian adalah 90.000 untuk menyablon, 80.000 untuk kuli keceh, sedangkan tenaga kerja baru diupah setengahnya. Ikatan kerja lemah, buruh batik dapat diliburkan dan diputuskerjakan tiba-tiba, serta melahirkan fenomena bong-bongan dan mangkal di pertigaan Bendo.
- Komunitas buruh batik miskin menerima bantuan seperti bedah rumah, namun belum menerima program "Batik Berlian" jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja informal.

Berikut kesimpulan terkait kemiskinan pada komunitas buruh batik:

- Komunitas serabutan memanfaatkan sumber daya sosial, informasi dan apapun yang dimiliki sebagai sarana produksi.
- Komunitas serabutan memiliki kegiatan kerja yang tidak menentu dalam hal

tempat, waktu, hasil dan perlindungan hukum. Relasi sosial dan informasi yang dimiliki dimanfaatkan untuk memperoleh pekerjaan temporer dan menjadi makelar. Kegiatan produktif kaum perempuan menjadi sumber penghasilan yang sangat penting.

- Komunitas serabutan justru menjalin relasi sosial kuat dengan pihak di luar Kelurahan Kauman, yang kemudian dikonversi menjadi dukungan sosial dan kerjasama yang membawa keuntungan.
- Komunitas serabutan banyak menjadi penerima PKH, adapun pemuda mulai mengakses Kartu Prakerja yang membuka jalan menjadi pekerja di perusahaan dengan upah di atas UMK.

8. REFERENSI

- Bernstein, H. (2019). *Dinamika Kelas dalam Perubahan Agraria*. Yogyakarta: INSISTPress.
- Budiyanto, S., dkk. (2018). *Environmental Analysis of The Impacts of Batik Waste Water Pollution on The Quality of Dug Well Water in The Batik Industrial Center of Jenggot Pekalongan City*. E3S Web Conference, 31, 1-7.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan. (2023). *Data Agregat Kependudukan Semester I*. Pekalongan.
- Goso, dan S. M. Anwar. (2017). *Kemiskinan Nelayan Tradisional serta Dampaknya terhadap Perkembangan Kumuh*. Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo, 3(1), 25-36.
- Hadi, A., dkk. (2019). *Tinjauan Kritis Ketahanan Sosial Masyarakat Miskin Perkotaan dan Perdesaan: Ruang Sosial, Kebijakan, dan Pola Kerentanan Sosial*. Jakarta: LIPI Press.
- Harahap, M. (2023). *Analisis Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Kota Medan*. Journal Economy and Currency Study, 5(2), 85-94.
- Hayati, C. (2012). *Pekalongan Sebagai Kota Batik 1950-2007*. Lensa: Kajian Kebahasaan, Kesusastraan, dan Budaya, 2(1), 1-19.
- Kadarwati, T. (2009). *Hubungan Kerja antara Juragan Batik, Mandor Penggarap dan Pengrajin Pembatik di Desa Bekonang Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo*.
- McCabe, I. E. (2004). *Batik Fabled Cloth of Java*. Singapore: Periplus Editions.
- Narotzky, S. (1997). *New Directions in Economic Anthropology*. London: Pluto Press.
- Peluso, N. L. (1994). *Rich Forest, Poor People: Resource Control and Resistance in Java*. Berkeley: University of California Press.
- Presiden Republik Indonesia. (1980). *Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring Trawl*. Jakarta: RI.
- Republik Indonesia. (1967). *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing*. Jakarta: RI.
- Republik Indonesia. (1968). *Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri*. Jakarta: RI.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-undang Pasal 9 Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia*. Jakarta: RI.

- Sari, S. R. (2011). *Pemanfaatan Tenaga Kerja Anak pada Industri Batik di Kelurahan Buaran Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan (Kasus di Industri Batik "Faaro" dan "Ghinata")*. (Skripsi Sarjana, Universitas Negeri Semarang).
- Satria, A. (2000). *Modernisasi Perikanan dan Mobilitas Sosial Nelayan, Studi Kasus Kelurahan Krapyak Lor Kodya Pekalongan Jawa Tengah*. (Tesis Magister, Institut Pertanian Bogor).
- Spradley, J. P. (1979). *The Ethnographic Interview*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Spradley, J. P. (1980). *Participant Observation*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Standing, G. (2011). *The Precariat*. London: Bloomsbury Academic.
- World Bank. (2018). *Poverty and Shared Prosperity 2018: Piecing Together the Poverty Puzzle*. Washington: World Bank.
- Yuwono, P. S. H. (2001). *Close to the Stone, Far from the Throne: The Story of a Javanese Fishing Community, 1820s-1990s*. (Disertasi Doktor, University of Amsterdam).